

SUBSIDI ENERGI

VS.

EFISIENSI FISKAL

Dilema Pembangunan



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

12 Maret 2026

SUBSIDI ENERGI VS. EFISIENSI FISKAL: DILEMA PEMBANGUNAN

Pendahuluan

Subsidi energi merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang paling kontroversial dalam pembangunan ekonomi. Di satu sisi, subsidi energi dipandang sebagai alat perlindungan sosial, penyangga daya beli masyarakat, penahan gejolak inflasi, dan bahkan simbol keberpihakan negara kepada rakyat. Di sisi lain, subsidi energi sering dikritik karena membebani anggaran negara, mendorong konsumsi berlebihan, memperlemah insentif efisiensi, salah sasaran, dan menghambat transisi menuju ekonomi rendah karbon. IMF merangkum dilema ini secara tajam: subsidi energi memang dimaksudkan untuk menjaga harga tetap rendah, tetapi menimbulkan biaya fiskal yang besar, mendorong alokasi sumber daya yang tidak efisien, memperburuk polusi, dan dalam banyak kasus lebih banyak dinikmati kelompok berpendapatan lebih tinggi daripada kelompok miskin. ([IMF](#))

Karena itu, perdebatan tentang subsidi energi sesungguhnya bukan sekadar soal "pro" atau "kontra." Ia adalah dilema pembangunan. Negara harus menyeimbangkan tujuan-tujuan yang sering saling bertabrakan: stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, disiplin fiskal, keadilan distribusi, daya saing industri, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks negara berkembang, dilema ini lebih rumit lagi karena subsidi energi sering tumbuh dari sejarah politik harga murah, keterbatasan sistem

perlindungan sosial, serta besarnya sensitivitas masyarakat terhadap kenaikan harga bahan bakar, listrik, dan LPG. IMF dalam *Fiscal Monitor 2025* menempatkan reformasi subsidi energi sebagai bagian penting dari upaya menciptakan ruang fiskal dan rasionalisasi belanja publik, terutama di negara berkembang dan emerging markets. ([IMF](#))

Bagi Indonesia, isu ini sangat relevan. Subsidi energi telah lama menjadi komponen penting dalam APBN, khususnya untuk BBM tertentu, LPG 3 kg, dan listrik. Dokumen *Recent Economic Development* Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada 2025 subsidi energi rumah tangga berada di kisaran Rp210,1 triliun. Angka ini menunjukkan betapa besarnya komitmen fiskal negara untuk menjaga keterjangkauan energi, tetapi sekaligus memperlihatkan besarnya sumber daya publik yang terikat pada satu pos belanja. Pada saat yang sama, berbagai kajian Bank Dunia menegaskan bahwa reformasi subsidi energi di Indonesia bukan hanya persoalan penghematan fiskal, tetapi juga menyangkut dampak sosial, distribusi manfaat, dan pilihan kebijakan kompensasi. ([Fiskal Kemenkeu](#))

Tulisan ini membahas subsidi energi versus efisiensi fiskal sebagai dilema pembangunan. Pertama, dijelaskan mengapa subsidi energi begitu persisten dalam kebijakan publik. Kedua, dibahas argumen yang mendukung subsidi energi. Ketiga, dianalisis biaya ekonomi, fiskal, dan lingkungan dari subsidi yang besar dan berkepanjangan. Keempat, dibahas pengalaman dan tantangan reformasi, terutama dalam konteks Indonesia. Kelima, ditawarkan kerangka kebijakan yang lebih seimbang antara perlindungan sosial dan efisiensi fiskal. Argumen utamanya adalah bahwa persoalan subsidi energi bukan terletak pada ada atau tidak adanya subsidi, melainkan pada desain, sasaran, transparansi, dan kompatibilitasnya dengan strategi pembangunan jangka panjang. ([IMF](#))

Mengapa Subsidi Energi Begitu Menarik Secara Politik?

Secara politik, subsidi energi sangat menarik karena manfaatnya langsung dirasakan dan mudah dipahami. Ketika harga BBM, listrik, atau LPG dijaga tetap rendah, rumah tangga segera merasakan efeknya pada biaya hidup. Pelaku usaha kecil juga merasakan manfaat pada ongkos produksi dan distribusi. Dalam jangka pendek, subsidi energi dapat meredam ketidakpuasan sosial, mengurangi tekanan inflasi, dan memberi kesan bahwa negara hadir melindungi rakyat. Inilah sebabnya subsidi energi sering menjadi instrumen politik yang lebih “terlihat” dibanding investasi jangka panjang seperti pendidikan, infrastruktur, atau reformasi kelembagaan. IMF mencatat bahwa reformasi subsidi energi kerap sulit dilakukan bukan karena argumen ekonominya lemah, tetapi karena manfaat harga murah terasa langsung, sedangkan manfaat reformasi sering baru tampak kemudian. (IMF)

Di banyak negara berkembang, subsidi energi juga berfungsi sebagai substitusi bagi sistem perlindungan sosial yang belum matang. Ketika basis data rumah tangga belum kuat, bantuan tunai belum presisi, dan jaminan sosial belum menjangkau semua kelompok rentan, harga energi murah dianggap sebagai cara paling praktis untuk membantu masyarakat luas. Namun justru di sinilah letak problemnya: subsidi energi bersifat umum (*universal*) dan tidak membedakan secara tajam antara rumah tangga miskin, kelas menengah, dan rumah tangga kaya. Akibatnya, negara membelanjakan sumber daya besar untuk memberi manfaat kepada semua orang, padahal tidak semua orang membutuhkannya pada derajat yang sama. IMF menegaskan bahwa subsidi energi lazimnya tidak terarah dengan baik kepada kelompok miskin dan lebih banyak dinikmati rumah tangga berpendapatan lebih tinggi karena mereka mengonsumsi energi lebih banyak. (IMF)

Untuk Indonesia, dimensi politik ini sangat nyata. Energi bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi komponen penting dalam persepsi keadilan sosial. Kenaikan harga BBM atau tarif listrik sering segera dibaca masyarakat sebagai tanda menurunnya keberpihakan negara. Karena itu,

pemerintah kerap menghadapi dilema: mempertahankan subsidi demi stabilitas sosial dan politik, atau menguranginya demi efisiensi fiskal dan realokasi anggaran. Sejarah reformasi subsidi di Indonesia menunjukkan bahwa keputusan penyesuaian harga energi hampir selalu disertai pertimbangan kompensasi sosial dan komunikasi publik yang intensif. Kajian Bank Dunia tentang reformasi subsidi BBM Indonesia pada 2022 menunjukkan bahwa dampak kebijakan harga harus dipahami bukan hanya secara fiskal, tetapi juga secara sosial dan politik. ([World Bank](#))

Argumen yang Mendukung Subsidi Energi

Ada beberapa argumen normatif dan praktis yang sering diajukan untuk mempertahankan subsidi energi. Pertama adalah argumen **perlindungan daya beli**. Energi merupakan input dasar bagi kehidupan sehari-hari: transportasi, memasak, penerangan, pendinginan, dan produksi barang serta jasa. Ketika harga energi naik tajam, dampaknya menjalar ke hampir seluruh struktur biaya ekonomi. Subsidi dipandang perlu untuk mencegah guncangan biaya hidup, terutama bagi rumah tangga miskin dan rentan. Dalam situasi inflasi tinggi atau gejolak harga global, subsidi energi menjadi alat penyangga agar konsumsi rumah tangga tidak jatuh terlalu dalam. Argumen ini relevan terutama pada masa krisis, ketika penyesuaian harga penuh bisa memperburuk kemiskinan dan ketimpangan. ([World Bank](#))

Kedua adalah argumen **stabilisasi ekonomi makro**. Harga energi yang melonjak dapat mendorong inflasi, menurunkan kepercayaan konsumen, dan menekan kegiatan usaha. Dalam ekonomi yang sangat sensitif terhadap biaya transportasi dan logistik, subsidi energi dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan dan barang kebutuhan pokok lain. Inilah sebabnya beberapa pemerintah memilih mempertahankan subsidi dalam periode tertentu, terutama saat terjadi lonjakan harga minyak dunia. IEA mencatat bahwa kawasan Asia Tenggara sangat rentan terhadap guncangan harga bahan bakar, dan subsidi konsumsi bahan

bakar fosil di kawasan melonjak tajam saat krisis energi global beberapa tahun terakhir. (IEA)

Ketiga adalah argumen **dukungan terhadap sektor produktif**. Energi murah dapat membantu industri, pertanian, perikanan, dan UMKM menekan biaya produksi. Bagi negara yang ingin menjaga daya saing industri atau mengendalikan biaya logistik, subsidi energi kadang dipandang sebagai instrumen pembangunan sektoral. Dalam kerangka ini, subsidi tidak dilihat semata sebagai konsumsi, tetapi juga sebagai dukungan terhadap kegiatan ekonomi. Namun argumen ini hanya kuat bila subsidi benar-benar diarahkan kepada sektor produktif yang strategis dan tidak berubah menjadi insentif pemborosan. (IMF)

Keempat adalah argumen **kewajiban moral negara**. Dalam negara kesejahteraan, ada pandangan bahwa energi dasar memiliki karakter semi-publik karena terkait dengan martabat hidup, mobilitas, dan partisipasi ekonomi warga. Dari sudut pandang ini, subsidi dipahami sebagai salah satu cara negara memastikan keterjangkauan layanan dasar, sebagaimana negara juga mensubsidi kesehatan, pendidikan, atau transportasi publik. Masalahnya, bila instrumen yang dipilih tidak tepat sasaran, kewajiban moral tersebut justru menghasilkan kebijakan yang mahal tetapi kurang adil. Itulah mengapa perdebatan tidak cukup berhenti pada pertanyaan "apakah negara harus melindungi rakyat?", melainkan harus melangkah ke pertanyaan "bagaimana negara melindungi rakyat secara paling efektif dan paling adil?" (IMF)

Biaya Fiskal: Ketika Subsidi Menggerus Ruang Pembangunan

Dari sudut pandang efisiensi fiskal, kelemahan terbesar subsidi energi adalah biaya anggarannya yang sangat besar. Setiap rupiah yang dipakai untuk menahan harga energi adalah rupiah yang tidak bisa dipakai untuk tujuan lain: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial yang lebih terarah, riset, irigasi, atau adaptasi iklim. IMF menyebut reformasi subsidi energi sebagai bagian dari penciptaan *fiscal space*,

yakni ruang fiskal yang memungkinkan negara mendanai prioritas pembangunan lain tanpa memperbesar defisit atau utang secara berlebihan. Ketika subsidi energi membesar, negara menghadapi *opportunity cost* yang sangat nyata. ([IMF](#))

Dalam konteks Indonesia, skala biaya ini mudah terlihat. Kementerian Keuangan melaporkan subsidi energi rumah tangga sekitar Rp210,1 triliun pada 2025. Angka sebesar ini menunjukkan bahwa subsidi energi bukan komponen kecil dalam kebijakan fiskal, tetapi salah satu pos yang sangat menentukan fleksibilitas APBN. Dalam kondisi pendapatan negara terbatas dan kebutuhan pembangunan sangat besar, besarnya subsidi berarti ruang untuk belanja produktif lain menjadi lebih sempit. Bahkan bila subsidi dibenarkan secara sosial, tetap harus diakui bahwa ia datang dengan harga fiskal yang tinggi. ([Fiskal Kemenkeu](#))

Efek fiskal lain adalah **ketidakpastian anggaran**. Subsidi energi sangat sensitif terhadap harga minyak dunia, nilai tukar, dan konsumsi domestik. Ketika harga global melonjak, beban subsidi bisa membengkak jauh melampaui asumsi awal APBN. Ini menyulitkan perencanaan fiskal dan dapat memaksa pemerintah mengubah komposisi belanja di tengah tahun. Negara menjadi lebih rentan terhadap guncangan eksternal karena sebagian anggarannya "terikat" pada kewajiban menjaga harga energi domestik. IMF menekankan bahwa subsidi energi dapat memperbesar kebutuhan pembiayaan pemerintah, memaksa kenaikan pajak atau utang, atau mengurangi belanja publik lain. ([IMF](#))

Ada pula persoalan **kualitas belanja publik**. Dari perspektif efisiensi, subsidi energi sering kali kalah produktif dibanding investasi yang meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang. Misalnya, anggaran yang sama bila dipakai untuk transportasi massal, jaringan listrik yang andal, irigasi, atau pendidikan teknis bisa menghasilkan manfaat pertumbuhan yang lebih besar dan lebih berkelanjutan. Kajian Bank

Dunia untuk Indonesia menunjukkan bahwa pengalihan subsidi energi, jika dikombinasikan dengan kebijakan lahan dan energi serta instrumen fiskal lain, dapat membantu pencapaian target iklim sekaligus memperbaiki hasil kesejahteraan dalam desain tertentu. Dengan kata lain, persoalannya bukan sekadar menghemat, tetapi memilih penggunaan anggaran yang memberi manfaat sosial-ekonomi lebih tinggi. ([World Bank](#))

Masalah Efisiensi Ekonomi: Subsidi dan Distorsi Perilaku

Subsidi energi bukan hanya mahal secara fiskal; ia juga sering tidak efisien secara ekonomi. Harga yang dibuat terlalu murah cenderung mendorong konsumsi berlebihan, mengurangi insentif penghematan, dan menunda investasi pada teknologi yang lebih efisien. Dari sudut teori ekonomi, subsidi harga menciptakan distorsi sinyal pasar. Konsumen dan produsen tidak lagi menghadapi harga yang mencerminkan kelangkaan sumber daya atau biaya sosial sesungguhnya. Akibatnya, keputusan ekonomi—dari pemilihan kendaraan hingga teknologi produksi—cenderung tidak optimal. IMF secara eksplisit menyatakan bahwa subsidi energi mendorong alokasi sumber daya yang tidak efisien dan menghambat pertumbuhan. ([IMF](#))

IEA juga menyediakan basis data subsidi bahan bakar fosil dengan pendekatan *price-gap*, yaitu selisih antara harga domestik yang dibayar konsumen dan harga acuan internasional. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana harga yang ditekan secara administratif dapat menyembunyikan biaya ekonomi sesungguhnya dari konsumsi energi. Dalam jangka panjang, harga energi yang terlalu murah mendorong ekonomi menjadi lebih intensif energi, memperbesar impor atau kebutuhan fiskal, dan mengurangi dorongan untuk beralih ke energi yang lebih efisien atau lebih bersih. ([IEA](#))

Distorsi ini juga berpengaruh pada struktur industri. Perusahaan yang seharusnya terdorong meningkatkan efisiensi atau mengadopsi

teknologi hemat energi dapat menunda penyesuaian karena menikmati input energi murah. Rumah tangga yang mampu membeli kendaraan lebih besar atau memakai energi lebih banyak memperoleh manfaat subsidi lebih besar daripada rumah tangga miskin. Dengan demikian, subsidi universal sering menghasilkan paradoks: kebijakan yang dimaksudkan membantu semua orang justru paling besar menguntungkan mereka yang paling banyak mengonsumsi energi. IMF menekankan bahwa rumah tangga kaya memperoleh manfaat lebih besar dari harga energi yang disubsidi karena intensitas konsumsi mereka lebih tinggi. (IMF)

Masalah Keadilan Distribusi: Siapa Sebenarnya yang Menikmati Subsidi?

Salah satu kritik paling kuat terhadap subsidi energi universal adalah masalah ketepatan sasaran. Secara intuitif, harga murah tampak pro-rakyat. Namun secara empiris, konsumsi energi biasanya meningkat seiring pendapatan. Rumah tangga kaya cenderung memiliki kendaraan lebih banyak, rumah lebih besar, lebih banyak peralatan listrik, dan konsumsi LPG atau BBM yang lebih tinggi. Akibatnya, mereka sering menerima manfaat subsidi lebih besar dalam nilai absolut dibanding rumah tangga miskin. IMF menegaskan bahwa subsidi energi tidak dirancang secara baik untuk mencapai tujuan distribusi karena mayoritas manfaat justru jatuh kepada kelompok berpendapatan lebih tinggi. (IMF)

Kajian Bank Dunia tentang reformasi subsidi BBM Indonesia menyoroti hal yang sama: subsidi energi di Indonesia memiliki sejarah panjang, tetapi efektivitas distribusinya terbatas karena manfaatnya tidak secara proporsional dinikmati rumah tangga paling miskin. Ini menjelaskan mengapa banyak ekonom kebijakan mendorong pergeseran dari subsidi harga umum menuju bantuan sosial yang lebih terarah. Jika tujuan utama adalah melindungi kelompok rentan, maka instrumen yang lebih tepat adalah transfer tunai, subsidi terarah, atau kompensasi berbasis

data rumah tangga, bukan penekanan harga secara menyeluruh. ([World Bank](#))

Dari perspektif etika kebijakan publik, ini merupakan masalah serius. Negara mengorbankan sumber daya fiskal besar atas nama keadilan sosial, tetapi desain instrumennya justru lemah secara distributif. Artinya, negara mungkin “terlihat” pro-rakyat, tetapi secara substantif belum tentu paling efektif membantu yang miskin. Dilema inilah yang menjadikan subsidi energi sangat sulit direformasi: secara simbolik ia populer, tetapi secara ekonomi dan distribusi sering suboptimal. ([IMF](#))

Subsidi Energi dan Lingkungan: Dari Harga Murah ke Transisi yang Tertunda

Dalam era transisi energi, subsidi bahan bakar fosil juga dinilai problematik karena memperlambat pergeseran ke sistem energi yang lebih bersih. Harga energi fosil yang murah membuat energi terbarukan, efisiensi energi, kendaraan listrik, dan teknologi bersih lainnya tampak relatif kurang menarik. Dengan demikian, subsidi tidak hanya berdampak pada APBN saat ini, tetapi juga pada arah pembangunan jangka panjang. IEA menekankan bahwa subsidi konsumsi bahan bakar fosil meningkat tajam saat krisis energi, dan lonjakan itu menunjukkan betapa besar ketergantungan banyak negara terhadap mekanisme harga murah untuk menahan guncangan sosial. Namun, ketergantungan ini sekaligus memperlihatkan kerentanan struktural terhadap harga fosil dan lambatnya transisi menuju sistem yang lebih tangguh. ([IEA](#))

IMF mengambil posisi yang lebih tegas lagi. Dalam pembaruan data 2025 mengenai subsidi bahan bakar fosil, IMF menunjukkan bahwa subsidi eksplisit global pada 2024 mencapai USD 725 miliar, dan ketika eksternalitas lingkungan serta biaya sosial diperhitungkan, angka subsidi “efisien” jauh lebih besar. Inti argumennya adalah bahwa harga energi fosil yang berada di bawah biaya sosial sesungguhnya mendorong emisi, polusi udara lokal, dan kerusakan lingkungan lain. Walaupun dalam

makalah kita lebih tepat fokus pada subsidi fiskal eksplisit, argumen IMF membantu menjelaskan bahwa persoalan subsidi bukan hanya soal kas negara, tetapi juga soal arah moral dan ekologis pembangunan. ([IMF](#))

Bagi negara berkembang, tentu ada keberatan yang sah: transisi energi tidak boleh mengorbankan akses dan keterjangkauan. Karena itu, pengurangan subsidi fosil tidak otomatis berarti keadilan lingkungan tercapai. Jika subsidi dihapus begitu saja tanpa pilihan energi bersih yang terjangkau, rumah tangga miskin bisa semakin tertekan. Jadi, dilema pembangunan di sini menjadi lebih dalam: negara harus mengurangi distorsi fiskal dan ekologis, tetapi juga menjaga legitimasi sosial dan akses energi dasar. Solusinya bukan sekadar "hapus subsidi," melainkan membangun jalur transisi yang adil dan bertahap. ([World Bank](#))

Indonesia sebagai Studi Kasus Dilema Pembangunan

Indonesia merupakan contoh yang sangat baik untuk melihat kompleksitas ini. Negara ini memiliki sejarah panjang subsidi energi, terutama BBM, listrik, dan LPG. Selama bertahun-tahun, subsidi diperlakukan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial, melindungi daya beli, dan menopang legitimasi politik. Namun ketika harga minyak dunia naik, beban anggaran meningkat tajam. Reformasi pernah dilakukan beberapa kali, tetapi hampir selalu disertai kontroversi politik dan kebutuhan kompensasi sosial. Kajian Bank Dunia 2024 tentang reformasi subsidi BBM Indonesia menilai dampak fiskal dan sosial dari penyesuaian harga September 2022 dan menunjukkan bahwa reformasi dapat mengurangi tekanan fiskal, tetapi keberhasilan sosialnya sangat bergantung pada desain kompensasi. ([World Bank](#))

Dalam konteks yang lebih strategis, Bank Dunia juga menunjukkan bahwa pengalihan subsidi energi, bila dirancang bersama kebijakan lain seperti pajak karbon, kebijakan lahan, dan transfer kompensasi, dapat membantu Indonesia mencapai target NDC dan sekaligus menghasilkan

manfaat ekonomi tertentu. Ini penting karena menunjukkan bahwa reformasi subsidi tidak harus dibaca sebagai kebijakan penghematan semata, tetapi dapat menjadi bagian dari restrukturisasi pembangunan menuju efisiensi dan keberlanjutan. Namun manfaat itu tidak otomatis muncul; ia bergantung pada apa yang dilakukan pemerintah terhadap "ruang fiskal" yang dihasilkan. Jika subsidi dikurangi tetapi dana hasil penghematan tidak dialihkan ke program produktif atau perlindungan sosial, maka legitimasi reformasi akan lemah. ([World Bank](#))

Dokumen fiskal pemerintah juga memperlihatkan bahwa APBN Indonesia terus berupaya menjaga keseimbangan antara dukungan ekonomi dan kehati-hatian fiskal. Dalam *Recent Economic Development* Kementerian Keuangan, narasi yang muncul adalah menjaga APBN tetap kredibel dalam jangka panjang sambil mendukung kinerja ekonomi. Di sini tampak jelas dilema yang dihadapi pemerintah: subsidi energi membantu stabilitas jangka pendek, tetapi APBN juga harus tetap sehat dan mampu mendanai prioritas struktural lain. ([Fiskal Kemenkeu](#))

Reformasi Subsidi: Mengapa Sulit?

Secara teori, reformasi subsidi energi tampak rasional. Bila subsidi mahal, salah sasaran, merusak lingkungan, dan menekan anggaran, maka menguranginya tampak seperti keputusan yang jelas. Namun dalam praktik, reformasi sering sangat sulit. IMF mengembangkan *Energy Subsidy Reform Measures Database* dan menunjukkan bahwa reformasi harga energi, tarif utilitas, dan bahkan reformasi BUMN terkait energi merupakan kebijakan yang secara politik kompleks di banyak negara. Kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa manfaat subsidi terasa sekarang dan luas, sedangkan manfaat reformasi sering bersifat abstrak, jangka menengah, dan memerlukan kepercayaan publik pada pemerintah. ([IMF](#))

Ada setidaknya lima penyebab utama reformasi sulit. Pertama, **ketidakpercayaan publik**. Masyarakat sering ragu bahwa penghematan

subsidi benar-benar akan dialihkan untuk kepentingan mereka. Kedua, **dampak inflasi langsung**. Kenaikan harga energi cepat terlihat di ongkos hidup. Ketiga, **ketiadaan kompensasi yang presisi**. Bila sistem bantuan sosial belum matang, reformasi tampak kejam. Keempat, **resistensi politik dan birokrasi** dari kelompok yang diuntungkan oleh status quo. Kelima, **narasi keadilan**: harga murah mudah dipahami sebagai bentuk keberpihakan, sedangkan efisiensi fiskal sering terdengar abstrak bagi masyarakat luas. ([World Bank](#))

Karena itu, reformasi subsidi yang berhasil biasanya membutuhkan tiga hal: komunikasi yang jujur, kompensasi yang kredibel, dan alternatif kebijakan yang nyata. Negara harus menjelaskan mengapa subsidi lama tidak adil dan tidak efisien, siapa yang akan dilindungi, dan ke mana dana penghematan akan dialihkan. Tanpa itu, reformasi akan dibaca semata-mata sebagai pengurangan manfaat bagi rakyat. ([IMF](#))

Menuju Jalan Tengah: Dari Subsidi Universal ke Dukungan yang Lebih Cerdas

Dilema pembangunan tidak bisa diselesaikan dengan posisi ekstrem. Mempertahankan subsidi energi universal secara permanen dapat melemahkan fiskal dan memperlambat transformasi ekonomi. Tetapi menghapus subsidi secara tiba-tiba tanpa perlindungan sosial juga berisiko menimbulkan guncangan sosial dan ketidakadilan. Karena itu diperlukan jalan tengah: dukungan energi yang lebih cerdas, lebih terarah, dan lebih transparan. IMF dalam *Fiscal Monitor 2025* mendorong rasionalisasi belanja energi yang disertai perlindungan bagi kelompok rentan. World Bank juga menekankan pentingnya menilai dampak sosial reformasi dan merancang opsi kebijakan kompensasi. ([IMF](#))

Jalan tengah itu dapat mencakup beberapa pendekatan. Pertama, **targeting**: bantuan energi lebih diarahkan kepada rumah tangga miskin dan rentan, bukan seluruh populasi. Kedua, **kompensasi tunai**: daripada menekan harga untuk semua orang, negara dapat memberi transfer

langsung kepada kelompok yang membutuhkan. Ketiga, **subsidi produktif**: dukungan energi dapat diprioritaskan pada sektor-sektor yang benar-benar strategis dan padat karya, dengan evaluasi berkala. Keempat, **investasi pengganti**: sebagian dana penghematan subsidi dialihkan ke transportasi publik, efisiensi energi, jaringan listrik, atau energi bersih rumah tangga. Kelima, **reformasi bertahap**: harga disesuaikan secara bertahap dengan komunikasi dan kompensasi yang jelas. ([Open Knowledge World Bank](#))

Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip efisiensi fiskal karena mengurangi kebocoran manfaat kepada kelompok yang tidak membutuhkan. Ia juga lebih sesuai dengan prinsip keadilan sosial karena sumber daya publik bisa dipusatkan pada kelompok paling rentan. Tantangannya tentu besar: perlu data sosial yang akurat, kapasitas administrasi, dan kredibilitas politik. Tetapi dalam jangka panjang, itulah arah kebijakan yang lebih sehat dibanding mempertahankan subsidi universal yang mahal dan distorsif. ([World Bank](#))

Implikasi bagi Pembangunan Nasional

Dari perspektif pembangunan, perdebatan subsidi energi vs efisiensi fiskal pada akhirnya adalah perdebatan tentang model negara seperti apa yang diinginkan. Negara yang terlalu lama mengandalkan subsidi universal mungkin tampak protektif, tetapi bisa kehilangan kapasitas untuk mendanai transformasi struktural. Sebaliknya, negara yang terlalu cepat mengejar efisiensi fiskal tanpa kepekaan sosial bisa kehilangan legitimasi dan memperdalam kerentanan. Karena itu, subsidi energi harus diposisikan dalam strategi pembangunan yang lebih luas. ([IMF](#))

Ada tiga implikasi penting. Pertama, **ruang fiskal adalah aset pembangunan**. Bila subsidi dapat dirasionalisasi dengan baik, negara memperoleh ruang untuk mendanai investasi yang lebih produktif: pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur hijau, dan perlindungan sosial yang lebih efektif. Kedua, **desain kebijakan lebih**

penting daripada slogan. "Subsidi" tidak otomatis adil, dan "efisiensi" tidak otomatis anti-rakyat. Yang menentukan adalah siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung biaya, dan apa dampak jangka panjangnya. Ketiga, **transisi kebijakan membutuhkan kapasitas negara.** Reformasi subsidi yang adil hanya mungkin bila negara mampu mengidentifikasi kelompok rentan, menyalurkan kompensasi, dan membangun kepercayaan publik. ([World Bank](#))

Dalam konteks Indonesia, ini berarti reformasi subsidi energi harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda reformasi negara secara keseluruhan: perbaikan kualitas belanja, penguatan perlindungan sosial, percepatan transisi energi, dan peningkatan kredibilitas APBN. Jika subsidi hanya dipertahankan karena alasan politik jangka pendek, maka dilema pembangunan akan terus berulang. Namun jika reformasi dijalankan tanpa keadilan sosial, maka legitimasi pembangunan juga akan terganggu. ([World Bank](#))

Penutup

Subsidi energi dan efisiensi fiskal bukanlah dua tujuan yang sepenuhnya dapat dipertentangkan secara hitam-putih. Subsidi energi lahir dari kebutuhan riil: melindungi daya beli, menstabilkan ekonomi, dan menjaga legitimasi sosial. Tetapi subsidi energi yang terlalu besar, universal, dan berkepanjangan membawa konsekuensi serius: membebani anggaran, mempersempit ruang fiskal, mendistorsi perilaku ekonomi, salah sasaran secara distribusi, dan memperlambat transisi energi. IMF, IEA, World Bank, dan data fiskal Indonesia semuanya menunjukkan bahwa masalah ini bukan teoritis, melainkan sangat nyata. ([IMF](#))

Karena itu, dilema pembangunan yang sesungguhnya bukan memilih antara "subsidi" atau "efisiensi" secara mutlak. Dilema yang sesungguhnya adalah bagaimana negara melindungi rakyat tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal, bagaimana menjaga keterjangkauan

energi tanpa memberi subsidi berlebihan kepada yang kaya, dan bagaimana menciptakan transisi dari kebijakan harga murah menuju dukungan yang lebih adil, lebih cerdas, dan lebih produktif. Kebijakan yang baik bukanlah kebijakan yang paling populer sesaat, melainkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan perlindungan sosial, disiplin fiskal, efisiensi ekonomi, dan arah pembangunan jangka panjang. (IMF)

Bila dilihat dari sudut ini, subsidi energi seharusnya diperlakukan bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai instrumen sementara yang harus terus dievaluasi. Negara tetap wajib hadir melindungi rakyat, tetapi perlindungan itu perlu dirancang agar tidak justru mengorbankan masa depan fiskal dan transformasi ekonomi bangsa. Dengan kata lain, tugas pembangunan modern bukan menghapus kehadiran negara, melainkan membuat kehadiran negara lebih tepat sasaran, lebih adil, dan lebih bertanggung jawab. (IMF)

Berikut **Glosarium** dan **Daftar Pustaka (APA 7)** untuk topik **“Subsidi Energi vs. Efisiensi Fiskal: Dilema Pembangunan.”**

Glosarium

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Rencana keuangan tahunan pemerintah yang menjadi instrumen utama kebijakan fiskal. Dalam konteks subsidi energi, APBN menanggung biaya untuk menjaga harga energi tertentu tetap terjangkau, sehingga besarnya subsidi langsung memengaruhi ruang fiskal negara. Dokumen

fiskal pemerintah menunjukkan bahwa subsidi energi rumah tangga pada 2025 berada pada kisaran Rp210,1 triliun. ([Kemenkeu Media](#))

Efisiensi fiskal

Kemampuan pemerintah menggunakan sumber daya anggaran secara hemat, tepat sasaran, dan produktif untuk menghasilkan manfaat publik yang maksimal. Dalam debat subsidi energi, efisiensi fiskal menekankan bahwa belanja negara seharusnya dialokasikan ke program dengan manfaat sosial-ekonomi tertinggi, bukan terserap secara berlebihan pada subsidi yang luas tetapi kurang terarah. IMF menempatkan reformasi subsidi energi sebagai bagian dari upaya menciptakan *fiscal space* dan mengurangi kerentanan fiskal. ([IMF](#))

Fiscal space (ruang fiskal)

Kapasitas pemerintah untuk membiayai prioritas pembangunan tambahan tanpa membahayakan keberlanjutan fiskal. Bila subsidi energi membesar, ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial lain menjadi lebih sempit. IMF menegaskan bahwa reformasi subsidi energi penting untuk menciptakan ruang fiskal bagi belanja yang lebih produktif. ([IMF](#))

Harga acuan internasional

Harga pembandingan di pasar global yang digunakan untuk menilai apakah harga domestik energi berada di bawah nilai pasar. IEA menggunakan pendekatan *price-gap* dalam basis data subsidi bahan bakar fosil untuk mengukur selisih antara harga konsumen domestik dan harga acuan internasional. ([IEA](#))

Inflasi energi

Kenaikan harga energi yang dapat memicu kenaikan biaya transportasi, logistik, produksi, dan konsumsi rumah tangga. Dalam kebijakan publik, subsidi energi sering dipertahankan untuk menahan dampak inflasi ini, terutama saat harga minyak dunia melonjak. IMF dan IEA sama-sama menyoroti sensitivitas ekonomi terhadap harga energi. ([IMF](#))

Kompensasi sosial

Bantuan yang diberikan pemerintah untuk melindungi rumah tangga rentan ketika subsidi energi dikurangi atau harga energi disesuaikan. Kajian Bank Dunia tentang reformasi subsidi BBM Indonesia menekankan pentingnya perluasan bantuan sosial untuk memitigasi dampak reformasi terhadap kelompok rentan. ([World Bank](#))

Price-gap approach

Metode untuk mengestimasi subsidi konsumsi energi dengan membandingkan harga energi domestik yang dibayar konsumen dengan harga referensi internasional. Bila harga domestik lebih rendah dari harga referensi, selisih tersebut dianggap sebagai bentuk subsidi konsumsi. Metode ini digunakan oleh IEA dalam basis data subsidi bahan bakar fosil. ([IEA](#))

Reformasi subsidi energi

Perubahan kebijakan untuk mengurangi, menghapus, atau menata ulang subsidi energi agar lebih efisien, lebih tepat sasaran, dan lebih sejalan dengan tujuan fiskal maupun lingkungan. IMF menilai reformasi subsidi energi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat keberlanjutan fiskal, tetapi secara politik sering sulit karena biaya reformasi terasa langsung sementara manfaatnya lebih menyebar dan jangka panjang. ([IMF](#))

Regresif

Sifat suatu kebijakan yang secara proporsional lebih menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi daripada kelompok miskin. Kajian Bank Dunia tentang Indonesia menyebut pengaturan subsidi energi saat ini masih sangat regresif, karena rumah tangga yang lebih kaya umumnya mengonsumsi energi lebih banyak sehingga menerima manfaat subsidi lebih besar. ([World Bank](#))

Subsidi energi

Dukungan pemerintah yang menurunkan harga energi yang dibayar

konsumen atau produsen di bawah biaya ekonomi atau harga pasarnya. IMF menjelaskan bahwa subsidi energi dimaksudkan untuk menjaga harga rendah, tetapi dapat menimbulkan biaya fiskal besar, inefisiensi alokasi, serta manfaat yang sering lebih banyak dinikmati kelompok kaya. ([IMF](#))

Subsidi eksplisit

Subsidi yang tercermin langsung dalam anggaran pemerintah, misalnya pembayaran kompensasi atau dukungan harga untuk BBM, LPG, atau listrik. Ini berbeda dari subsidi implisit yang berkaitan dengan tidak diperhitungkannya biaya eksternal seperti polusi dan emisi. IMF pada 2025 menyoroti besarnya subsidi eksplisit global bahan bakar fosil. ([IMF](#))

Subsidi universal

Subsidi yang diberikan kepada seluruh konsumen tanpa seleksi berdasarkan pendapatan atau tingkat kerentanan. Kebijakan ini mudah diterapkan secara politik, tetapi cenderung tidak efisien dan kurang adil karena banyak manfaat jatuh kepada rumah tangga yang tidak membutuhkan dukungan. ([World Bank](#))

Subsidi terarah / targeted subsidy

Subsidi yang dirancang khusus untuk kelompok tertentu, misalnya rumah tangga miskin, sektor usaha mikro, atau pengguna energi tertentu. Pendekatan ini dianggap lebih efisien secara fiskal dibanding subsidi universal karena sumber daya publik dapat difokuskan pada penerima yang benar-benar membutuhkan. Bank Dunia menekankan pentingnya penguatan program bantuan sosial sebagai bagian dari reformasi subsidi di Indonesia. ([World Bank](#))

Subsidi bahan bakar fosil

Subsidi yang diberikan pada BBM, gas, batu bara, atau produk energi fosil lain. IEA mencatat bahwa di Asia Tenggara subsidi konsumsi bahan bakar fosil melonjak menjadi rekor USD 105 miliar pada 2022 akibat

krisis energi global, menegaskan kerentanan kawasan terhadap guncangan harga energi. (IEA)

Trade-off kebijakan

Konsekuensi saling tukar antara tujuan kebijakan yang berbeda. Dalam topik ini, trade-off utamanya adalah antara menjaga harga energi tetap rendah demi perlindungan sosial dan menjaga anggaran negara tetap efisien serta berkelanjutan. IMF menempatkan dilema ini sebagai inti reformasi subsidi energi. (IMF)

Transisi energi

Perubahan bertahap dari sistem energi berbasis fosil menuju sistem yang lebih bersih, efisien, dan rendah emisi. Subsidi energi fosil yang besar dapat memperlambat transisi ini karena mengurangi insentif untuk efisiensi energi dan energi terbarukan. IEA menekankan bahwa kawasan Asia Tenggara masih sangat sensitif terhadap harga fosil dan membutuhkan reformasi untuk memperkuat ketahanan energi. (IEA)

Volatilitas harga komoditas energi

Perubahan harga minyak, gas, atau energi lain yang cepat dan sulit diprediksi. Volatilitas ini membuat subsidi energi menjadi beban fiskal yang tidak stabil, karena saat harga global naik pemerintah harus mengeluarkan dana lebih besar untuk menjaga harga domestik. Dokumen fiskal pemerintah Indonesia juga mengakui bahwa volatilitas harga komoditas berpotensi membebani APBN. (Fiskal Kemenkeu)

Daftar Pustaka (APA 7)

International Energy Agency. (2024). *Southeast Asia energy outlook 2024*. IEA. <https://www.iea.org/reports/southeast-asia-energy-outlook-2024>

International Energy Agency. (n.d.). *Fossil fuel subsidies database*. IEA.
<https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/fossil-fuel-subsidies-database>

International Monetary Fund. (2025). *Fiscal monitor, April 2025: Chapter 2—Public sentiment matters: The essence of successful energy subsidies and pension reforms*. IMF.
<https://www.imf.org/en/publications/fm/issues/2025/04/23/fiscal-monitor-april-2025>

International Monetary Fund. (2025). *Fiscal monitor, April 2025: Chapter 2 online annexes*. IMF. <https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2025/english/ch2onlineannex.pdf>

International Monetary Fund. (2025, April 16). *How to build public support for energy subsidy and pension reforms*. IMF Blog.
<https://www.imf.org/en/blogs/articles/2025/04/16/how-to-build-public-support-for-energy-subsidy-and-pension-reforms>

International Monetary Fund. (2025). *Underpriced and overused: Fossil fuel subsidies, data 2025 update* (IMF Working Paper). IMF.
<https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2025/12/20/underpriced-and-overused-fossil-fuel-subsidies-data-2025-update-572729>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal. (2025). *Recent economic development: November 2025*. BKF Kemenkeu.
https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/red/file/1764758712_2025_11_november_red-k.pdf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN KiTa: Kerja keras APBN 2025 untuk Indonesia (Q4 2025)*. Kementerian Keuangan.
<https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/b1259fa9-5650-478a-970f-3e7ecb0e4303/Publikasi-APBNKITA-Q4-2025.pdf>

World Bank. (2024). *Indonesia's fuel subsidies reforms*. World Bank.
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099748505212431959/pdf/IDU1e31e5e531f16114baa1b62c1b3201c9c2e68.pdf>

World Bank. (2025). *Indonesia economic prospects*. World Bank.
<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospect>

World Bank. (2023). *Indonesia Country Climate and Development Report*. World Bank.
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099042823064019635/pdf/P177245-25ebd2a6-1af2-42a4-ad3f-d89409039679.pdf>

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 12 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69aa40dd-9010-83a1-80e1-865dbf258862>